



Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/finetech>



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sakip Desa Se-Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang

¹Adzillah Marhamah, ²Nugraha, ³Leni Yuliyanti

Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB,
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
Correspondence: E-mail: adzmarhamah@gmail.com

ABSTRACT

The objective of this study is to describe competence of the village apparatus, information technology utilization, the government's intern control system (SPIP), and organizational commitment, as well as the influence of competence of village apparatus, information technology utilization, the government's intern control system (SPIP), and commitment organization in SAKIP Desa in Situraja District Sumedang Regency. This research is quantitative research with descriptive and verification methods. The sample consists of 75 village apparatus from 15 village which consists of village chief, the village secretary, head of finance affairs, head of administrative and general affairs, head of planning affairs. The research used saturated sample technique. the validity test uses the Pearson product moment technique and the reliability test uses Cronbach alpha. The data in this study are primary data in the form of respondents answers collected by distributing questionnaires distributed directly. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that the competence of village apparatus and the government internal control system had an effect on the SAKIP Desa. While the information technology ubtilization and organizational commitment has no effect on the SAKIP Desa.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 2 December 2024

First Revised 2 January 2025

Accepted 11 March 2025

First Available online 30 April 2025

Publication Date 30 April 2025

Keyword:

SAKIP Desa, Competency of Village Apparatus, Information Technology Utilization, Government Internal Control System, Organizational Commitment.

1. INTRODUCTION

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah desa diberikan kesempatan untuk mengurus pemerintahannya sendiri dan membantu proses pemerataan pembangunan. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan Sumedang menjadi Kabupaten pertama di Jabar bahkan di Indonesia yang memiliki gagasan untuk mengaplikasikan SAKIP Desa yang diberlakukan sejak tahun 2019. Namun tahun 2023 di Kabupaten Sumedang Kepala desa Sundamekar, Cisu ditangkap atas penyelewengan DD tahun 2018-2019 dan di desa Nagrawangi, Rancakalong diduga terjadi korupsi sebesar Rp233 Juta. Dengan terjadinya hal tersebut akuntabilitas dana desa belum terjadi sebagaimana mestinya, serta dengan Sumedang menjadi pelopor SAKIP Desa tidak menutup kemungkinan penyelewengan yang terjadi. Dengan kejadian tersebut akan menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa mendefinisikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada pemerintah desa, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pemerintah desa. Adapun indikatornya merujuk pada Peraturan Bupati Sumedang No. 86 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

Dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun indikatornya yaitu pengetahuan, keahlian dan sikap (Edison, Anwar, & Komariyah, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup pengolahan data, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dalam rangka pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat (Fama & Jensen, 2005). Adapun indikatornya yaitu komputer dan jaringan internet (Aziiz & Prastiti, 2019). PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun indikatornya merujuk pada PP tersebut dan Martini et al. (2019) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Komitmen organisasional merupakan suatu rasa identifikasi, keterlibatan, dan kesetiaan yang diekspresikan oleh pegawai terhadap organisasinya (Ivancevich et al., 2007). Adapun indikatornya yaitu komitmen afektif, komitmen kontinu dan komitmen normatif (Mada & Dkk, 2017).

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah sampel pada penelitian ini yang di ambil di Kabupaten Sumedang tepatnya di desa se-Kecamatan Situraja. Selain itu, SAKIP Desa merupakan hal baru di Indonesia dimana Sumedang merupakan pelopor SAKIP Desa di Indonesia. Sehingga untuk meyakinkan teori tersebut maka dilakukan pengembangan penelitian dengan objek penelitian desa se-Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, peneliti memilih judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SAKIP Desa se-Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang”.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah, komitmen organisasi dan SAKIP desa se-Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji pengaruh kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah, komitmen organisasi terhadap SAKIP desa se-Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Populasi penelitian merupakan aparat desa berjumlah 75 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan tata usaha dan umum dan kepala urusan perencanaan dari 15 desa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini menggunakan skala numerik dengan lima alternatif jawaban dan data yang dihasilkan berupa data interval.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan perhitungan persentase dan analisis statistik inferensial. Analisis statistik inferensial tersebut meliputi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Selain itu, terdapat uji regresi linear multipel. Untuk pengujian hipotesis pada penelitian ini digunakan uji keberartian regresi (uji F) dan uji keberartian koefisien regresi (uji t).

3. RESULTS AND DISCUSSION

Dalam teori agensi masyarakat selaku principals memberi kepercayaan kepada pemerintah (*agent*) untuk mengatur dan mengurus desa. Kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, SPIP dan komitmen organisasi merupakan hal yang penting dalam mencapai SAKIP desa. Dengan aparat yang kompeten akan membantu proses SAKIP desa begitu pula dengan teknologi informasi, dan dengan adanya SPIP akan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya penyelewengan serta dengan adanya komitmen organisasi aparat desa pada desa akan lebih berusaha lagi dalam mencapai SAKIP Desa yang lebih baik. Hasil analisis deskriptif pada variabel kompetensi aparat desa disajikan pada tabel 1.

Tabel 1 Deskripsi Variabel Kompetensi Aparat Desa

Indikator	Frekuensi	Persentase	Kriteria
Pengetahuan (<i>knowlegde</i>)	63	84%	Tinggi
Keahlian (<i>skill</i>)	67	89,33%	Tinggi
Sikap (<i>attitude</i>)	71	94,67%	Tinggi
Persentase keseluruhan	71	94,67%	Tinggi

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa pada indikator pengetahuan sebanyak 63 aparat desa atau 84% memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai pekerjaannya. Pada indikator keahlian sebanyak 67 aparat desa atau 89,33% memiliki keahlian teknis yang sangat sesuai dengan pekerjaannya. Pada indikator sikap sebanyak 71 aparat desa atau 94,67% bersikap sangat sesuai dalam menghadapi lingkungan kerja. Adapun secara keseluruhan terdapat 71 aparat desa atau dengan persentase 94,67% aparat desa yang memiliki tingkat kompetensi tinggi. Hasil analisis deskriptif pada variabel pemanfaatan teknologi informasi disajikan pada tabel 2.

Tabel 2 Deskripsi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator	Frekuensi	Persentase	Kriteria
Komputer	62	82,67%	Tinggi
Jaringan Internet	75	100%	Tinggi
Persentase keseluruhan	75	100%	Tinggi

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa pada indikator komputer sebanyak 62 aparat desa atau 82,67% mampu menggunakan komputer dalam membantu pekerjaannya. Pada indikator jaringan internet sebanyak 75 aparat desa atau 100% menggunakan jaringan internet sesuai dengan kebutuhan. Adapun secara keseluruhan terdapat 75 aparat desa atau dengan persentase 100% aparat desa yang memiliki tingkat pemanfaatan teknologi informasi yang tinggi. Hasil analisis deskriptif pada variabel SPIP disajikan pada tabel 3.

Tabel 3 Deskripsi Variabel SPIP

Indikator	Frekuensi	Persentase	Kriteria
Lingkungan pengendalian	75	100%	Tinggi
Penilaian resiko	75	100%	Tinggi
Kegiatan pengendalian	72	96%	Tinggi
Informasi dan komunikasi	64	85,33%	Tinggi
Pemantauan	38	50,67%	Tinggi

Persentase keseluruhan	75	100%	Tinggi
------------------------	----	------	--------

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa pada indikator lingkungan pengendalian sebanyak 75 aparat desa atau 100% sesuai dalam menjaga lingkungan pengendalian. Pada indikator penilaian resiko sebanyak 75 aparat desa atau 100% mampu melakukan penilaian resiko. Pada indikator kegiatan pengendalian sebanyak 72 aparat desa atau 96% baik dalam melakukan kegiatan pengendalian. Pada indikator informasi dan komunikasi sebanyak 64 aparat desa atau 85,33% sesuai dalam melaksanakan kegiatan informasi dan komunikasi. Pada indikator pemantauan sebanyak 38 aparat desa atau 50,67% sesuai dalam melakukan evaluasi. Adapun secara keseluruhan terdapat 75 aparat desa atau dengan persentase 100% aparat desa yang memiliki tingkat sistem pengendalian internal pemerintah yang tinggi. Hasil analisis deskriptif pada variabel komitmen organisasi disajikan pada tabel 4.

Tabel 4 Deskripsi Variabel Komitmen Organisasi

Indikator	Frekuensi	Persentase	Kriteria
Afektif	74	98,67%	Tinggi
Keberlanjutan	63	84%	Tinggi
Normatif	43	57,33%	Tinggi
Persentase keseluruhan	62	82,67%	Tinggi

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa pada indikator afektif sebanyak 74 aparat desa atau 98,67% memiliki komitmen afektif yang tinggi terhadap organisasi. Pada indikator keberlanjutan sebanyak 63 aparat desa atau 84% memiliki komitmen kontinyu yang tinggi terhadap organisasi. Pada indikator normatif sebanyak 43 aparat desa atau 57,33% memiliki komitmen normatif yang tinggi terhadap organisasi. Adapun secara keseluruhan terdapat 62 aparat desa atau dengan persentase 84,67% aparat desa yang memiliki tingkat komitmen organisasi yang tinggi. Hasil analisis deskriptif pada variabel SAKIP Desa disajikan pada tabel 5.

Tabel 5 Deskripsi Variabel SAKIP Desa

Indikator	Frekuensi	Persentase	Kriteria
Perencanaan kinerja	75	100%	Tinggi
Pengukuran kinerja	71	94,67%	Tinggi
Pelaporan kinerja	73	97,33%	Tinggi
Evaluasi kinerja	72	96%	Tinggi
Pencapaian sasaran/kinerja organisasi	73	97,33%	Tinggi
Persentase keseluruhan	75	100%	Tinggi

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa indikator lingkungan pengendalian sebanyak 75 aparat desa atau 100% mampu dalam upaya perencanaan kinerja. Pada indikator pengukuran kinerja sebanyak 71 aparat desa atau 94,67% sesuai dengan pengukuran kinerja. Pada indikator pelaporan kinerja sebanyak 73 aparat desa baik dalam melaksanakan pelaporan kinerja. Pada indikator evaluasi kinerja sebanyak 72 aparat desa atau 96% mampu melakukan evaluasi kinerja. Pada indikator pencapaian sasaran/kinerja organisasi sebanyak 73 aparat desa atau 97,33% sesuai dengan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Adapun secara keseluruhan terdapat 75 aparat desa atau dengan persentase 100% aparat desa yang memiliki tingkat SAKIP desa yang tinggi.

Hasil uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Berdasarkan uji normalitas dengan SAKIP desa sebagai variabel dependen diperoleh nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200 yang berarti nilainya $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Uji linearitas diperoleh hasil bahwa variabel kompetensi aparat desa 0,189 yang artinya lebih besar dari 0,05, variabel pemanfaatan teknologi informasi 0,639 yang artinya lebih besar dari 0,05, variabel SPIP 0,817 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan variabel komitmen organisasi 0,520 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, SPIP dan komitmen organisasi terhadap SAKIP desa terdapat hubungan yang linier. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser diperoleh nilai signifikansi untuk variabel kompetensi aparat desa sebesar 0,482 $> 0,05$, nilai signifikansi untuk pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,511 $> 0,05$, nilai signifikansi untuk sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 0,050 $> 0,05$, dan nilai signifikansi untuk komitmen organisasi sebesar 0,915 $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas terhadap keempat variabel independen pada penelitian ini. Uji multikolinearitas nilai *Tolerance* untuk kompetensi aparat desa sebesar 0,400 $> 0,10$, nilai *Tolerance* untuk pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,358 $> 0,10$, nilai *Tolerance* untuk sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 0,392 $> 0,10$, dan nilai *Tolerance* untuk komitmen organisasi sebesar 0,460 $> 0,10$. Adapun nilai VIF untuk kompetensi aparat desa sebesar 2,502 < 10 , nilai VIF untuk pemanfaatan teknologi informasi sebesar 2,795 < 10 , nilai VIF untuk sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 2,553 < 10 , dan nilai VIF untuk komitmen organisasi sebesar 2,175 < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini.

Tabel 6 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	61.347	9.489		6.465	<.001

Kompetensi Aparat Desa	.729	.325	.285	2.243	.028
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.448	.358	-.168	-1.253	.215
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	.717	.123	.747	5.812	<.001
Komitmen Organisasi	-.467	.360	-.154	-1.299	.198

a. Dependent Variable: SAKIP Desa

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 6, diketahui bahwa nilai konstanta yang dihasilkan yaitu sebesar 61.347. Untuk nilai koefisien kompetensi aparat desa sebesar 0,729, nilai koefisien pemanfaatan teknologi informasi sebesar -0,448, nilai koefisien sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 0,717, dan nilai koefisien komitmen organisasi sebesar -0,467. Berdasarkan hasil koefisien tersebut maka persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{SAKIP D} = 61.347 + 0,729\text{KAD} - 0,448\text{PTI} + 0,717\text{SPIP} - 0,467\text{KO}$$

Keterangan:

- SAKIP D = SAKIP Desa
 KAD = Kompetensi Aparat Desa
 PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi
 SPIP = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
 KO = Komitmen Organisasi

Tabel 7 Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3009.841	4	752.460	21.154	<.001 ^b
Residual	2489.945	70	35.571		
Total	5499.787	74			

a. Dependent Variable: SAKIP Desa

b. Predictors: (*Constant*), Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan hasil pengelolaan data pada tabel 7 diatas, didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 21,154 dengan nilai F_{tabel} sebesar 2,497 pada taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima yang artinya regresi berarti dan dapat digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian.

Tabel 8 Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	61.347	9.489		6.465	<.001
Kompetensi Aparat Desa	.729	.325	.285	2.243	.028
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.448	.358	-.168	-1.253	.215
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	.717	.123	.747	5.812	<.001
Komitmen Organisasi	-.467	.360	-.154	-1.299	.198

a. Dependent Variable: SAKIP Desa

Berdasarkan pengelolaan data pada tabel 8 dengan menggunakan IBM SPSS dihasilkan t_{hitung} sebesar 2,243 sedangkan t_{tabel} atau $t(0,025 ; 73)$ dengan $sig.a = 0,05$ sebesar 1,993. Artinya ditarik kesimpulan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,243 > 1,993$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif terhadap SAKIP Desa. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif terhadap SAKIP Desa terbukti. Sehingga hasil ini dapat menunjukkan bahwa dengan memiliki kompetensi yang baik akan memberikan pengaruh dan dapat meningkatkan SAKIP desa pada desa se-Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan pengelolaan data pada tabel 8 dengan menggunakan IBM SPSS dihasilkan t_{hitung} sebesar -1,253 sedangkan t_{tabel} atau $t(0,025 ; 73)$ dengan $sig.a = 0,05$ sebesar 1,993. Artinya ditarik kesimpulan bahwa nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ yaitu $-1,253 \leq 1,993$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap SAKIP Desa. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap SAKIP Desa tidak terbukti. Sehingga hasil ini dapat menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan teknologi informasi yang baik tidak akan memberikan pengaruh pada SAKIP desa pada desa se-Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan pengelolaan data pada tabel 8 dengan menggunakan IBM SPSS dihasilkan t_{hitung} sebesar 5,812 sedangkan t_{tabel} atau $t(0,025 ; 73)$ dengan $sig.a = 0,05$ sebesar 1,993. Artinya ditarik kesimpulan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,812 > 1,993$ maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

berpengaruh positif terhadap SAKIP Desa. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap SAKIP Desa terbukti. Sehingga hasil ini dapat menunjukkan bahwa dengan memiliki sistem pengendalian internal pemerintah yang baik akan memberikan pengaruh dan dapat meningkatkan SAKIP desa pada desa se-Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan pengelolaan data pada tabel 8 dengan menggunakan IBM SPSS dihasilkan t_{hitung} sebesar -1,299 sedangkan t_{tabel} atau $t(0,025;73)$ dengan $sig.a = 0,05$ sebesar 1,993. Artinya ditarik kesimpulan bahwa nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ yaitu $-1,299 \leq 1,993$ maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap SAKIP Desa. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap SAKIP Desa tidak terbukti. Sehingga hasil ini dapat menunjukkan bahwa dengan komitmen aparat desa pada organisasi yang baik tidak akan memberikan pengaruh pada SAKIP desa pada desa se-Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.

Kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap SAKIP desa hal tersebut sesuai dengan teori keagenan, masalah keagenan dalam teori agensi terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Dalam hal ini masyarakat (*principal*) memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa (*agent*) untuk mengatur dan mengurus seluruh kegiatan yang menyangkut desa baik dana desa ataupun pembuatan keputusan menyangkut desa. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan cara meningkatkan kompetensi aparat desa terkait pengelolaan dana desa, sehingga tuntutan akuntabilitas dapat tercapai. Kompetensi yang memadai dari aparat desa dapat meningkatkan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat membantu prinsipal dalam menerapkan mekanisme kontrolnya.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori keagenan dimana pemerintah berkewajiban untuk menyediakan atau memberikan catatan yang bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan. Apalagi mengingat Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terbaik di Indonesia hasil penelitian ini tidak mencerminkan kondisi yang seharusnya di lapangan. Dari hasil analisis tanggapan responden variabel pemanfaatan teknologi informasi diketahui sebagian besar aparat desa mengisi pada kriteria tinggi sehingga ketidaksesuaian tidak memungkinkan bersumber dari tanggapan responden yang mempunyai kriteria secara umum paling banyak tinggi, indikator 1 (komputer) paling banyak kriteria tinggi, begitu pula indikator 2 (jaringan internet) paling banyak kriteria tinggi. Adapun untuk indikator dan pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini masih bersumber dari Aziis & Prastiti pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang segala sesuatu di Kabupaten Sumedang sudah menggunakan aplikasi atau web. Pernyataan yang digunakan dalam Aziis dan Prastiti pada tahun 2019 merupakan pernyataan-pernyataan mendasar mengenai penggunaan komputer dan jaringan internet dalam membantu pekerjaan aparat desa. Sehingga tidak sesuai dengan kondisi Kabupaten Sumedang yang menjadi kabupaten percontohan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ketidaksesuaian yang terjadi disebabkan oleh

indikator dan pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan dimana pemerintah desa (agen) harus melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga masyarakat akan merasa puas dengan kinerja pemerintah desa. Aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan. Dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah aparat desa dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum serta kebijakan manajemen yang berlaku sehingga dapat meminimalisir adanya penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa. Dengan dilaksanakannya sistem pengendalian internal pemerintah sebagaimana mestinya maka akan menghasilkan SAKIP desa yang lebih baik lagi. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori keagenan dimana pemerintah desa (agen) harus melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga masyarakat akan merasa puas dengan kinerja pemerintah desa. Dari hasil analisis tanggapan responden variabel komitmen organisasi diketahui sebagian besar aparat desa mengisi pada kriteria tinggi sehingga ketidaksesuaian tidak memungkinkan bersumber dari tanggapan responden yang mempunyai kriteria secara umum paling banyak tinggi, indikator 1 (afektif) paling banyak kriteria tinggi, indikator 2 (berkelanjutan) paling banyak kriteria tinggi, dan indikator 3 (normatif) yang paling banyak kriteria tinggi. Indikator dan pernyataan yang digunakan pada variabel komitmen organisasi bersumber dari Mada & dkk pada tahun 2017 sedangkan indikator dan pernyataan pada variabel SAKIP desa bersumber dari Peraturan Bupati Sumedang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa. Mengingat variabel SAKIP desa yang sumbernya tahun 2021 sementara untuk variabel komitmen organisasi masih menggunakan sumber tahun 2017 kemungkinan hal tersebut yang menyebabkan ketidaksesuaian yang terjadi.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi SAKIP desa se-Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang yaitu kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi berada pada kriteria tinggi. Kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap SAKIP desa se-Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi aparat desa maka akan semakin tinggi pula SAKIP desa. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap SAKIP desa se-Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Hal ini menunjukkan bahwa ada atau tidaknya pemanfaatan teknologi informasi tidak akan berpengaruh pada SAKIP desa. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap SAKIP desa se-Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sistem pengendalian internal pemerintah maka akan semakin tinggi pula SAKIP desa. Komitmen organisasi tidak

berpengaruh terhadap SAKIP desa se-Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Hal ini menunjukkan bahwa ada atau tidaknya komitmen organisasi tidak akan berpengaruh pada SAKIP desa. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu indikator dan pernyataan yang digunakan dalam angket pada variabel pemanfaatan teknologi informasi dan variabel komitmen organisasi belum menggunakan angket yang terbaru dan sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan indikator dan pernyataan dalam angket yang sesuai.

5. REFERENCES

- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*.
- Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: ALFABETA.
- Fama, E. F., & Jensen, E. C. (2005). Agency Problems and Residual Claims. *Electronic Journal*.
- Ivancevich, J. M., Konopaske, R., & Matteson, M. T. (2007). Perilaku Dan Manajemen Organisasi (Alih Bahasa Gina Gania), Edisi Tujuh. Jakarta: Erlangga.
- Mada, S., & Dkk. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap SAKIP Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*.
- Martini, R., & al., e. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*.
- Peraturan Bupati Sumedang No. 86 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa
- PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- UU ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Kompetensi Kerja